



AROMA KECURANGAN VERIFIKASI PARPOL MENGUAR

ICW Duga 7 KPU Provinsi 'Disetir', KPU Siap Sidang Mediasi

Tensi politik Indonesia terus naik. Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama organisasi lainnya menyampaikan temuan soal dugaan adanya praktik kecurangan dalam proses verifikasi faktual partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024. Organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih ini menyampaikan setidaknya ada 12 kabupaten dan 7 provinsi diduga 'disetir' alias mengikuti instruksi dari KPU Pusat untuk berbuat curang saat proses verifikasi faktual parpol. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun telah beberapa kali menepis tuduhan tersebut. Meski demikian, laporan-laporan itu tetap akan diusut. Bahkan terkait Partai Ummat yang melayangkan gugatan, KPU siap untuk menghadiri sidang mediasi dengan Partai Ummat di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jakarta pada Senin (19/12/2022).

KRONOLOGI INDIKASI KECURANGAN VERIFIKASI FAKTUAL PARPOL

- Tanggal 5 November 2022,** setelah melakukan verifikasi faktual partai politik, KPU kabupaten/kota menyerahkan hasil verifikasi faktual ke KPU tingkat provinsi.
- Tanggal 6 November 2022,** KPU provinsi melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik untuk seluruh kabupaten/kota melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
- Tanggal 7 November 2022.** Seharusnya waktu ini dijadwalkan untuk agenda penyampaian hasil rekapitulasi verifikasi faktual partai politik oleh KPU provinsi kepada KPU RI.
- Anggota KPU RI dengan cara mendesak KPU provinsi melalui video call untuk mengubah status verifikasi parpol dari yang awalnya tidak memenuhi syarat berubah menjadi memenuhi syarat.
- Rencana ini terkendala, karena beberapa anggota KPU daerah, baik kabupaten/kota tidak sepakat melakukan kecurangan tersebut. Model intervensi pun berubah, kali ini melalui Sekretaris Jenderal KPU yang disinyalir memerintahkan sekretaris provinsi untuk melakukan hal serupa.
- Adapun caranya, yakni sekretaris provinsi memerintahkan pegawai operator Sipol, baik kabupaten/kota, untuk mendatangi kantor KPU provinsi kemudian diminta mengubah status verifikasi partai politik.

DUGAAN INTIMIDASI DARI KPU RI KEPADA KPU DAERAH MELALUI DUA CARA

- Pertama,** ancaman mutasi yang ditujukan kepada pegawai KPU daerah jika menolak instruksi untuk mengubah status verifikasi partai politik.

(Baca Hal 11)

KOALISI MASYARAKAT SIPIL KAWAL PEMILU BERSIH MENUNTUT BEBERAPA HAL DI ANTARANYA:

- KPU mengaudit besar-besaran SIPOL dan menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat.
- Komisi II DPR memanggil KPU sebagai bentuk menjalankan mandat pengawasan untuk mengklarifikasi temuan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Jika kemudian ditemukan adanya pelanggaran atau kecurangan dalam proses verifikasi faktual partai politik, Koalisi juga turut mendesak Komisi II DPR memanfaatkan kewenangannya berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk merekomendasikan pemberhentian anggota KPU RI yang berbuat kecurangan.
- Presiden Joko Widodo harus memastikan penyelenggaraan pemilihan umum 2024 tidak dicemari dengan praktik intimidasi, kecurangan, koruptif, dan manipulatif.

Sumber:
Koalisi Masyarakat Sipil
Kawal Pemilu Bersih

**Government (Hal.2)
Deklarasi Capres
Sebelum April 2023
Hanya 7 Partai
Melenggang ke
DPR RI**

- Kedua,** intimidasi terhadap jajaran KPU daerah terkait proses seleksi calon anggota KPU daerah yang akan digelar tahun 2023. Sederhananya, jika menolak instruksi, maka tidak akan dipilih sebagai anggota KPU daerah mendatang.

Prediksi Pemilu 2024

Deklarasi Capres Sebelum April 2023

Hanya 7 Partai Melenggang ke DPR RI

JAKARTA - Berbagai dinamika politik di Indonesia terus terjadi jelang Pemilu 2024. Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro memprediksi partai politik akan berbondong-bondong mendeklarasikan bakal calon presiden (capres) pada tahun 2023. Dia menyebut setidaknya sebelum April 2023 sudah ada tokoh-tokoh yang bakal diumumkan kepada publik.

Mulanya, Siti Zuhro meyakini deklarasi calon presiden dilakukan menjelang pertengahan tahun. Sebab pada awal 2023 nanti akan ada pengerucutan koalisi. "Kayanya 2023, kayanya nggak sampai pertengahan kayanya. Semua itu akan mengerucutkan koalisi, kaya mungkin pendukung Anies, 3 partai kayanya mengurucut, KIB juga sama nanti. Apakah Gerindra sama itu PKB gitu ya," kata Siti Zuhro kepada wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (18/12/2022).

Bahkan, dia memastikan waktunya tak bakal lama-lama yakni sebelum bulan April 2023 selesai. Sebab, dia memprediksi para parpol tersebut tengah terburu-buru untuk menarik perhatian masyarakat. "Bagaimanapun juga akan menyedot perhatian masyarakat, jadi mereka in hurry juga untuk melakukan koalisi cepat dan ingin mencalonkan. Coba lihat, nggak sampai lebih dari April," jelas dia.

Siti memprediksi, pergerakan cepat yang dilakukan parpol itu lantaran adanya rasa khawatir dengan sosok Anies Baswedan yang dinilai sudah berada di atas angin. Dia menyebut parpol lain merasa kewalahan dengan kekosongan dan kebebasan Anies untuk melakukan kunjungan-kunjungan.

"Tapi 2023 ini mereka kompetisi,

mereka sudah pingin menurunkan calonnya, karena takut sama Anies, on the top, kalau dia sendirian, dia paling pengagungan sendiri, jadi dia melanglang buana, kan gitu. Mereka empot-empotan juga," ujar Siti.

Belakangan diketahui, KPU telah mengundi dan menetapkan urutan Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2024 tanda kontestasi politik dimulai pada Rabu (14/12/2022) lalu. Namun, hingga kini baru partai NasDem yang mendeklarasikan capresnya.

Dia adalah mantan Gubernur DKI Anies Baswedan yang telah habis masa jabatannya tahun 2022 ini. Partai Nasdem memiliki ambang batas 10,26% dalam Pemilu 2019. Artinya, dia harus menambah koalisi agar dapat mengusung Anies maju di Pemilu 2024.

Akan tetapi, belakangan diketahui NasDem sendiri tengah intens dengan PKS dan Demokrat. PKS sendiri memiliki suara sebanyak 8,7% dan Demokrat memperoleh 9,39%. Dengan demikian jika ditotal ketiga partai itu dapat mengusulkan satu calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu 2024 mendatang dengan ambang batas sebesar 28,35%

PDIP Posisi Teratas

Elektabilitas PDI Perjuangan (PDIP) mencapai 24,1 persen. PDIP bersama enam partai lainnya diprediksi bakal melenggang ke DPR. Hal tersebut mengacu survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada Minggu (18/12/2022).

Di bawah PDIP, ada Partai Golkar dengan 9,4 persen, Partai Gerindra 8,9 persen, Partai Demokrat 8,9 persen, PKS 6,2 persen, PKB 6,1 persen, dan Perindo 4,6 persen. Responden



(Ilustrasi) Berbagai bendera partai bakal segera menghiasi ruas jalan jelang Pemilu 2024. (Foto-dok)

ditanyakan pilihan partai politik (parpol) apabila pemilu diadakan saat survei.

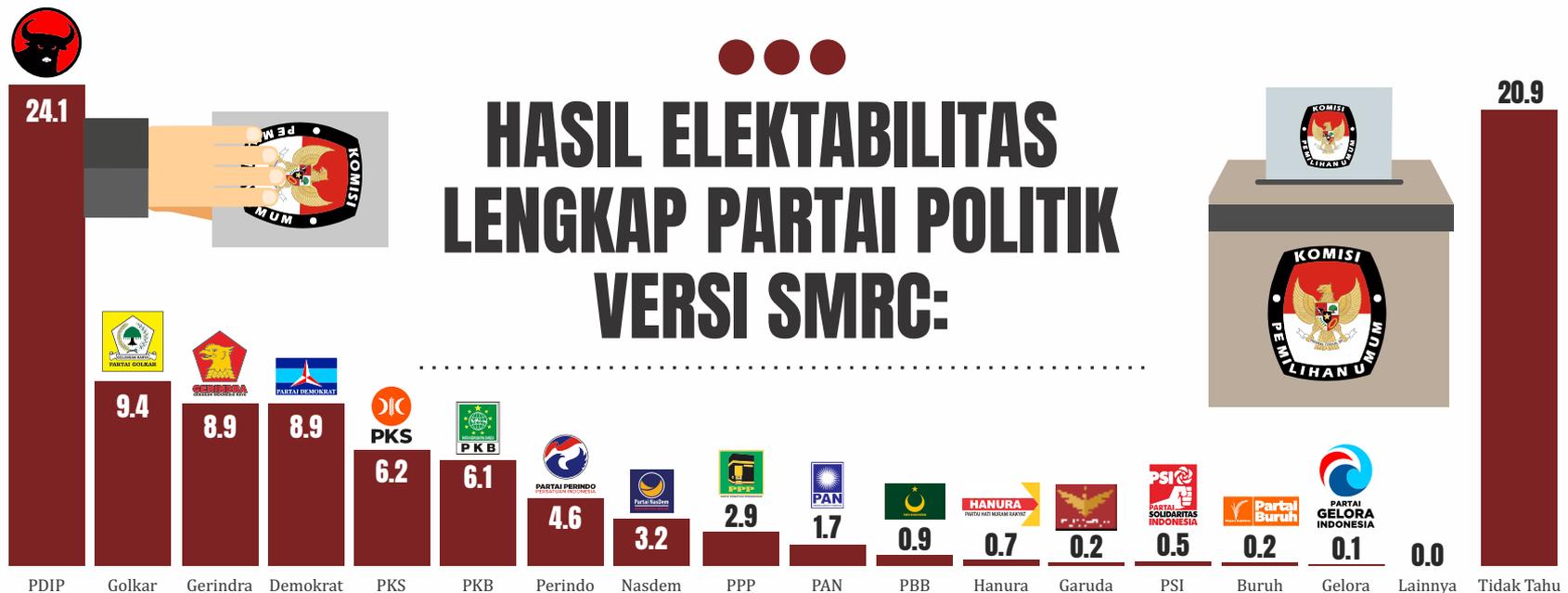
Sebagai informasi, angka parliamentary threshold atau ambang batas parpol mengikuti penentuan kursi di DPR, sebesar 4 persen. Adapun partai yang terancam gagal lolos ke Senayan, yakni Partai Nasdem 3,2 persen, PPP 2,9 persen, PAN 1,7 persen, Partai Bulan Bintang (PBB) dengan elektabilitas 0,9 persen, Partai Hanura 0,7 persen, Partai Garuda 0,6 persen, PSI 0,5, Partai Buruh dipilih 0,2 persen, Partai Gelora 0,1 persen, dan PKN 0,0 persen.

Terdapat 20,9 persen warga yang belum menentukan pilihan. "Setiap partai masih punya peluang menaikkan dukungan, karena masih

ada sekitar 20,9 persen warga yang saat ini belum menentukan pilihan," kata Direktur Riset SMRC, Deni Irvani saat merilis survei SMRC, Minggu (18/12/2022).

Survei SMRC dilakukan secara tatap muka pada 3-11 Desember 2022. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilu. Dari populasi itu dipilih secara acak sebanyak 1.220 responden.

Responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.029 atau 84 persen. Angka margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar plus minus 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (wid,rls, ist/dya)



Ada Apa? Baru Saja Jadi, DPR Setujui Revisi UU IKN



Lokasi yang akan dibangun menjadi Kawasan Ibu Kota Nusantara dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). (Foto: dok)

JAKARTA - Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang disahkan pada 15 Februari 2022 disepakati untuk direvisi. Pada Desember 2022 ini DPR RI sudah memasukkan perubahan Rancangan Undang-Undang atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 dalam prolegnas prioritas 2023. Umur baru 10 bulan sudah direvisi, ada apa?

"Dapat kami laporkan bahwa berdasarkan pendapat mini fraksi-fraksi yang disampaikan juru bicara masing-masing fraksi, serta pendapat Pemerintah, semua Fraksi menyetujui secara bulat hasil evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022, penyusunan dan pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024," kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi di Jakarta, dikutip Minggu (18/12/2022).

Meski demikian, Anggota DPR RI Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama menanggapi langkah pemerintah merevisi UU IKN. Menurutnya revisi ini tidak relevan dan bukti bahwa pemerintah gegabah dalam merencanakan pembangunan.

Politikus PKS itu berpandangan bahwa UU IKN sejak awal memang belum direncanakan dengan matang. Hal itu makin diperkuat dengan kemunculan usulan merevisi beleid yang belum berusia satu tahun itu. "Tidak relevan dan bukti gegabah dalam perencanaan pembangunan," ujarnya.

Diketahui, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly sebelumnya mengusulkan RUU IKN

dilakukan untuk percepatan pembangunan dan kepastian pembangunan. Rancangan Undang-Undang atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 tentang IKN. Dia menilai dalam UU 3/2022 tentang IKN perlu ditambahkan kepastian proses, persiapan, pembangunan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan pemungutan daerah khusus IKN.

"Materi UU ini utamanya mengatur penguatan otoritas IKN secara optimal melalui pengaturan kewenangan khusus pendanaan pengolahan barang milik negara, pengolahan kekayaan IKN, kemudahan pembiayaan dan fasilitas penanaman modal, ketentuan hak atas tanah yang progresif, dan adanya jaminan kelangsungan untuk pembangunan IKN," jelas Yasonna dalam raker dengan DPR.

Kadin: Sentimen Baik

Terpisah, Wakil ketua Umum Bidang Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Insanul Kamil menilai rencana pemerintah merevisi UU IKN sebagai upaya memberi tawaran yang menarik bagi investor. Utamanya soal kepemilikan lahan.

"Investor tentu menginginkan jaminan kepemilikan atau hak atas lahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Mungkin selama 90 tahun atau bisa dua kali lipat," ujarnya.

Menurut Insanul, keinginan pemerintah untuk memperjelas skema investasi melalui revisi UU IKN ini seharusnya menjadi sentimen yang baik dan sinyal optimistis bagi investor dan kalangan dunia usaha.

Komitmen investasi yang telah berhasil dijemput oleh pemerintah dari beberapa negara seperti UEA, Cina dan Korea Selatan, kata dia, perlu ditindaklanjuti dengan adanya skema investasi yang memberikan durasi waktu yang sesuai dan terukur.

Dalam hal ini, Insanul melihat pemerintah sedang berupaya meyakinkan investor bahwa kejelasan skema investasi akan sama-sama memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia maupun investor.

"Hal yang terpenting bagi pemerintah adalah bahwa skema investasi nantinya harus dilaksanakan sesuai perencanaan, jelas porsi pendanaan oleh pemerintah dan swasta diharapkan tidak memberatkan APBN," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Bima Arya menyatakan wali kota se-Tanah Air mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. "Apeksi, seluruh wali kota, insyaallah, mendukung IKN dengan catatan bahwa pembangunan IKN juga menguntungkan seluruh Kalimantan. Sembilan wali kota harus dapat berkahnya juga," kata Bima Arya, dalam perjalanan ponton yang ditarik ke arah hulu Teluk Balikpapan ke IKN.

IKN dikelilingi oleh Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, dan Penajam. Balikpapan dan Samarinda adalah dua kota utama Kalimantan Timur yang menjadi pusat perekonomian dan pusat pemerintahan Benua Etam.

Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melaksanakan pembangunan Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ketua Satgas Pembangunan IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, menjelaskan proses konstruksi Istana Kepresidenan telah dilakukan sejak November 2022. Danis mengatakan proses konstruksi yang saat ini tengah dikerjakan adalah penyiapan atau pembersihan Kawasan Istana Negara dan akses jalan masuk. "Dan persiapan pembangunan pondasi," kata Danis, Minggu (18/12/2022).

Adapun, Istana Negara di IKN Nusantara dibangun di atas lahan seluas 100 hektare. Kawasan Istana Negara nantinya akan memiliki luas 50 ha dan memiliki taman botani seluas 50 ha. Proyek pembangunan Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN Nusantara senilai Rp1,34 triliun dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PTPP).

Sementara itu, bangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN Nusantara senilai Rp1,35 triliun dikerjakan oleh Waskita Karya (WSKT). Proyek tersebut telah dimulai sejak November 2022 tanpa dilakukan prosesi groundbreaking dari pemerintah. "Langsung mobilisasi alat dan pekerja," jelasnya.

Lebih lanjut, Danis menargetkan pihaknya akan melanjutkan pembangunan infrastruktur lainnya pada tahun ini. Menurutnya, kontrak proyek yang akan dikerjakan dalam waktu dekat adalah pembangunan Kantor Kementerian Koordinator dan rumah dinas menteri. "Segera mulai di akhir Desember atau awal Januari," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah menargetkan semua infrastruktur dasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sudah selesai dibangun pada 2024. Salah satu proyek yang menjadi prioritas adalah pembangunan Istana Presiden. (wid,ist,rls/dya)

MATERI REVISI UNDANG-UNDANG IKN

MATERI REVISI

-  Perubahan cakupan wilayah IKN
-  Tambahan dasar pelaksanaan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN.
-  Pengaturan kewenangan khusus Otorita IKN.
-  Pendanaan, pembiayaan dan pengelolaan barang milik negara.
-  Pengelolaan kekayaan IKN yang dipisah.
-  Kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal.
-  Ketentuan hak atas tanah yang progresif.
-  Jaminan kelangsungan untuk keseluruhan pembangunan IKN.

URGensi REVISI UU IKN

-  Mempercepat persiapan pembangunan dan pemindahan IKN.
-  Mengoptimalkan peran Otorita IKN yang akan menjadi kepala pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara.
-  Menghadapi dinamika perkembangan pembangunan IKN.

Hari Pekerja Migran Internasional Ratusan Ribu Pahlawan Devisa Terancam Tak Berkewarganegaraan



(Ilustrasi) pekerja migran Indonesia yang menjadi pahlawan devisa namun terancam berbagai masalah.

JAKARTA - Meski sudah tidak terhitung berapa devisa yang berhasil disumbangkan oleh para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Tanah Air, namun nasib mereka masih belum bisa lepas dari berbagai permasalahan yang cukup menghantui. Mulai dari potensi mereka tidak memiliki kewarganegaraan hingga masalah hukum.

Hari Pekerja Migran Internasional diperingati setiap 18 Desember sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi International Convention on the Protection of All the Rights of Migrant Workers and Their Families 1990 atau Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990.

"Peringatan Hari Pekerja Migran ke-32 tahun ini penting bagi Pemerintah Indonesia, yang merupakan negara pengirim, untuk merefleksikan perlindungan mereka yang sering disebut pahlawan devisa," ujar Koordinator Subkomisi Pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) Komnas HAM RI, Anis Hidayah, dikutip dari tempo.co, Minggu (18/12/2022)

Hari ini atau tepatnya tanggal 18 Desember 2022 diperingati sebagai Hari Pekerja Migran Internasional. Peringatan Hari Pekerja Migran ke-32 tahun ini, dibayangi nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sampai saat ini masih memprihatinkan.

Aris menyebutkan sebanyak 325.477 orang berpotensi tidak memiliki kewarganegaraan atau stateless di Malaysia. "Konjen Indonesia di Malaysia mencatat WNI yang berpotensi menjadi stateless di Sabah, Malaysia, sebanyak 151.979

orang WNI di Kinabalu dan 173.498 orang di Tawau; dengan total keseluruhan 325.477 orang," kata Anis.

Terkait dengan masalah ini, Komnas HAM bersama dengan Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM) dan Commission on Human Rights of the Philippines (CHRP) sepakat menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Sabah, Malaysia, pada 23 April 2019 lalu.

Selain itu, lanjut Anis, berdasarkan data Komnas HAM, Malaysia menjadi negara tertinggi yang diadukan terkait permasalahan pekerja migran Indonesia (PMI).

Atas dasar hal tersebut, Komnas HAM merekomendasikan Pemerintah Indonesia membentuk tim kerja khusus untuk menangani PMI dan anak-anak yang kehilangan kewarganegaraan tersebut.

Komnas HAM juga mendorong Pemerintah untuk membangun kerja sama strategis dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait dalam menangani permasalahan PMI. "Serta menempatkan peran masyarakat sipil sebagai mitra kerja Pemerintah dalam mengupayakan perlindungan PMI sesuai dengan standar HAM," tambahnya.

Selain itu, lanjut Anis, sepanjang pandemi, ribuan pekerja migran menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja, Myanmar, Laos, dan Filipina. Anis menyebutkan, selama periode 2020 hingga 2022 pihaknya telah menerima 257 aduan terkait dengan PMI. Kasus yang diadukan antara lain, pemenuhan terhadap hak-hak pekerja

migran karena gaji dan asuransi tidak dibayarkan. Kemudian terkait permohonan pemulangan PMI karena hilang kontak, meninggal, hingga dugaan penyanderaan oleh majikan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

"Kemudian kasus lain, mereka menghadapi kriminalisasi di negara tujuan, korban perkosaan yang berhadapan dengan hukum, serta penahanan di negara tujuan," ungkap Anis, dikutip dari pilar.com, Minggu (18/12/2022).

Menurut Anis, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) menjadi pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM. Sementara itu, negara yang paling banyak diadukan adalah Malaysia.

Data Komnas HAM menunjukkan bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) menjadi pihak yang tertinggi diadukan. Malaysia menjadi negara tertinggi yang paling banyak diadukan terkait dengan permasalahan pekerja migran Indonesia.

"Sementara Jawa Barat menjadi Provinsi yang paling banyak mengadukan permasalahan pekerja migran," ujar Semendawai yang sayangnya tak merinci data yang dimaksudnya.

Selain itu, Komnas HAM juga melakukan monitoring secara khusus terkait pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kurun waktu 2017-2022, sebanyak 624 PMI asal NTT meninggal dunia di luar negeri.

"Banyak di antara mereka yang sebab-sebab meninggal dunianya tidak diketahui sampai sekarang. Banyak juga di antara mereka yang hak asasinya belum terpenuhi," kata dia.

"Penting bagi pemerintah Indonesia untuk merefleksikan perlindungan mereka yang sering disebut sebagai pahlawan devisa," lanjut Anis.

Selain itu, Kajian Komnas HAM pada 2020 tentang modern slavery terhadap ABK menemukan berbagai peristiwa perlakuan keji dan sewenang-wenang terhadap ABK

warga negara Indonesia. Diantaranya dilarungnya mayat ABK asal Indonesia ke laut yang bekerja di sebuah kapal perikanan tangkap asal Cina dan ditemukannya mayat ABK asal Indonesia dalam mesin pendingin kapal.

"Ragam masalah pelanggaran HAM yang masih terus terjadi pada pekerja migran Indonesia salah satunya dipicu oleh masih lemahnya sosialisasi aturan terkait perlindungan PMI baik oleh pemerintah, pusat dan daerah," ujar Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai dalam keterangannya, dikutip dari republika.co.id, pada Ahad (18/12/2022)..

Hal ini diperparah kurangnya pengawasan terhadap operasionalisasi perusahaan penempatan PMI. Bahkan Komnas HAM mengendus adanya dugaan keterlibatan oknum aparat pemerintah, terutama dalam hal pemalsuan identitas dan dokumen calon buruh migran.

"Serta minimnya peran pencegahan dari Pemda mulai dari tingkat kabupaten sampai desa," ujar Semendawai. (lut/dya)



Ragam masalah pelanggaran HAM yang masih terus terjadi pada pekerja migran Indonesia salah satunya dipicu oleh masih lemahnya sosialisasi aturan terkait perlindungan PMI baik oleh pemerintah, pusat dan daerah,"

Abdul Haris Semendawai
Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM



Bawaslu Bentuk Satgas Pengawas Medsos, Pentingkah?

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bakal meluncurkan satuan tugas (satgas) pengawas media sosial (medsos) pada Januari 2023 mendatang. Hal itu untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran lewat medsos yang bisa saja terjadi. Sehingga unggahan di medsos yang dinilai berpotensi membuat polarisasi maupun kegentingan jelang Pemilu 2024 bisa di-takedown.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengatakan bakal membentuk satgas pengawas media sosial jelang Pemilu 2024. Satgas ini, kata dia, terdiri dari personel Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta tim siber Kepolisian RI.

Rahmat menjelaskan, pihak yang punya alat untuk mengawasi medsos adalah Kominfo. Sementara Bawaslu nantinya akan meninjau apakah unggahan suatu akun itu melanggar aturan atau tidak.

"Jadi untuk pengawasan medsos itu Kominfo yang punya alatnya. Kemudian kami yang mereview apakah itu melanggar atau tidak," kata Bagja di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, dikutip dari tempo.co Sabtu (17/12/2022).

Dia mengatakan satgas pengawas medsos ini dimaksudkan untuk meredam isu di medsos yang tidak benar dan bertentangan dengan Undang-Undang. Selain itu, unggahan di medsos yang berpotensi membuat polarisasi dan kegentingan tak luput dari pengawasan Bawaslu.

Adapun soal indikatornya, Rahmat menyebut Bawaslu sedang merumuskan bersama Kominfo hingga tim hukum. Ia memastikan bahwa satgas pengawas medsos ini tidak akan mengancam kebebasan berekspresi.

"Ini kita atur nanti, sehingga kita sedang bicara dengan Kominfo dan tim hukum untuk menentukan. Tapi kalau SARA itu bukan kebebasan berbicara ya," kata dia.

Jika ada unggahan yang mengarah ke hoaks, SARA, politik identitas, maupun hal lain yang dianggap memperuncing polarisasi, Rahmat menyebut unggahan tersebut bakal di-takedown. Dia mengatakan satgas pengawas medsos akan mulai beroperasi pada Januari 2023 mendatang.

"Kalau implisit mesti ada pendalaman. Tapi kalau sudah eksplisit, ya bagi kami take down. Potensinya akan kaya jawab menjawab. Anyerang B, ini nyerang ini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Kebebasan Berekspreasi Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net), Nenden Sekar Arum, mengatakan Bawaslu mesti punya batasan dan indikator yang jelas soal konten yang bakal diawasi. Jika tidak, kata dia, sudah pasti ada potensi



(Ilustrasi) Kantor Bawaslu RI

mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi.

"Harus dilihat dulu kewenangan satgasnya sejauh mana? Tugasnya apa saja? Punya batasan dan indikator yang jelas ngga soal konten yang diawasi? Kalau ngga ada, sudah pasti berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi," kata Nenden kepada tempo, Minggu (18/12/2022).

Selain itu, dia mengatakan Bawaslu mesti menentukan dengan jelas siapa pihak yang menilai suatu konten mengandung SARA, hoaks, dan sebagainya. Adapun mekanisme takedown konten disebut Nenden juga patut dipastikan oleh Bawaslu.

Dia menjelaskan, indikator yang bisa digunakan satgas Bawaslu agar tidak mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi bisa merujuk pada Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspreasi yang diterbitkan Komnas HAM.

Adapun jika merujuk pada peraturan internasional, Nenden mengatakan Bawaslu bisa merujuk pada article 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Untuk lebih memastikan agar satgas Bawaslu tidak berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi, Nenden mengatakan Bawaslu mesti melibatkan banyak stakeholders. Hal ini dimaksudkan agar perlindungan kebebasan berekspresi bisa terjamin.

"Kalau mau lengkap harus diperbanyak stakeholdersnya, untuk memastikan perlindungan kebebasan berekspresi

perlu juga ada human rights expert buat kasih keseimbangan," kata dia.

Di satu sisi, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mendukung penuh rencana Bawaslu ihwal program pengawasan media sosial jelang Pemilu 2024. Menurut Jokowi, media sosial kerap menjadi hulu permasalahan soal Pemilu.

Jokowi mengibaratkan media sosial sebagai sarana untuk mengipas-ngipas isu. Buntutnya, kata Jokowi, lapangan bakal menjadi ramai imbas panas dari medsos.

"Karena memang masalahnya sering dimulai dari medsos. Ngipas-ngipasi dimulai dari situ, nanti lapangannya jadi panas dan ramai karena kipasan dari medsos," kata Jokowi.

Oleh sebab itu, Jokowi sangat setuju jika Bawaslu membentuk tim pengawas medsos. Jokowi turut mengingatkan Bawaslu untuk

memperhatikan soal politik identitas, SARA, hingga hoaks.

Menurut Jokowi, hal tersebut rawan terjadi jelang Pemilu 2024. Buntutnya, keutuhan negara bisa terpecah-belah. Oleh sebab itu, Jokowi meminta Bawaslu untuk segera bertindak jika menemukan kejadian serupa di lapangan.

"Kalau ada percikan kecil soal ini, segera diperingatkan. Nggak usah ragu, segera peringatkan, panggil. Pasti grogi," ujarnya.

Jokowi menjelaskan, salah satu upaya untuk menghindari politik identitas, SARA, hingga hoaks yakni dengan membentuk aturan yang rigid. Ia mendorong Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bekerja sama dalam membuat aturan ini.

RI 1 tersebut turut mewanti-wanti Bawaslu dan KPU agar membuat aturan yang tidak multi tafsir. Sehingga, kata Jokowi, peringatan bisa diberikan dengan landasan yang jelas.

"Aturannya jangan banyak tafsir. Buat aturan yang gamblang, yang jelas, sehingga kalau memberi peringatan juga jelas. Gedoknya itu bisa jelas, dook! Udah," kata Jokowi. (lut/dya)



(Ilustrasi) Bawaslu RI bakal bentuk Satgas pengawas medsos

VIA VALLEN

Berbagi
Cerita
Hidupnya

MENJADI anak pertama dalam keluarga, penyanyi Via Vallen bagikan pelajaran dari cerita hidupnya yang mungkin juga banyak dialami anak zaman sekarang.

Sebagai anak pertama dalam keluarga, Via mengaku selalu rutin memberikan uang untuk adik-adiknya.

Tak hanya uang, Via Vallen bahkan memberikan hadiah berupa motor hingga mobil.

"Dulu, pas rejekiku mulai banyak tiap bulan per tgl 1 mereka dapet jatah uangjajan dari aku

Bahkan hadiah dari aku (Mobil,Motor dll)," tulis Via di akun @viavallen.

"Setiap biaya yang keluar misal service sampe bayar pajak juga aku yang bayar," kenangnya.

Bahkan ketika setiap tanggal 1 dan Via Vallen belum mengirimkan uang, saudara-saudaranya akan saling bertanya.

"Yang lucu lagi, misal tgl 1 aku belum kasih uang jatah nih, pada nanya ke sodara satunya udah di kasih jatah belom. Jadi kaya gajian yak," tulis Via Vallen.



Sampai akhirnya Via Vallen menyadari kesalahannya.

Sikapnya saat itu justru memanjakan adik-adiknya hingga membuat beberapa adiknya tidak berusaha mencari kerja.

"Jatah yang aku kasih bikin mereka terlena dan enggak kerja (tapi ini gak semua adekku ya, beberapa aja)," tulisnya.

"Barulah aku sadar caraku salah, akhirnya aku stop jatah bulanan dan biaya biaya pribadi mereka termasuk service dan pajak kendaraan dengan tujuan biar mereka mikir dan mau kerja," imbuhnya.

Tapi, tindakannya itu justru membuat Via dimusuhi adik-adiknya. Bahkan mobil dan motor yang dia berikan berakhir dijual.

"Aku dimusuhi dong, bahkan hadiah dari aku (mobil dll) diem-diem dijual tanpa basa-basi," tulisnya.

"Parahnya lagi malah nyalahin aku karena enggak punya duit dan bilang yang namanya hadiah kan haknya yang dikasih mau diapain aja. Iya sih, tapi ya enggak diem-diem apalagi sampai musuhin yang ngasih juga," imbuhnya disertai emoji tertawa.

Atas kejadian yang pernah dialami itu, Via Vallen berharap banyak orang di luar sana yang sedang dalam posisi seperti dirinya, bisa mulai mengambil sikap.

Karena hal itu penting untuk masa depan adik-adiknya agar bisa berdiri di atas kaki sendiri.

"Kesimpulannya buat anak pertama di sini adalah kamu harus tegas! Jangan terlalu manjain adek-adekmu," tulisnya.

"Ajarin mereka tanggung jawab biar enggak terbiasa ketergantungan sama kamu. Karena kalau kamu (anak pertama) udah enggak ada, mereka enggak rapuh, jadi mudah bangkit," lanjutnya.

Via Vallen juga menegaskan bahwa cerita lamanya ini dibagikan hanya untuk memberikan motivasi dan pelajaran pada anak pertama lainnya. Dia juga mengatakan saat ini adik-adiknya sudah jauh lebih baik dan lebih dewasa dibanding sebelumnya.

"Itu kisah lama jauh banget dari zaman aku belum nikah. Sekarang adek-adekku udah pada dewasa, pada baik-baik, enggak males," tulisnya.

"Karena udah lewat jadinya buat aku malah lucu, dan tujuannya juga untuk memotivasi anak pertama lain yang masih terjebak di situasi itu, agar bisa mengambil sikap demi kebaikan bersama," sambungnya.

Profil Via Vallen

Mulidia Octavia atau yang lebih dikenal dengan nama Via Vallen ini merupakan anak dari pasangan Mohammad Arifin dan Rosida yang lahir pada 1 Oktober 1990. Sejak duduk di bangku Sekolah Dasar, Via Vallen sering ikut mendampingi ayahnya yang juga seorang musisi dangdut. Ayahnya sering manggung di acara hajatan di kampung-kampung. Via sendiri mulai menyukai dangdut saat kelas 2 SMP.

Sejak itu, ia tidak hanya menemani ayahnya, namun juga ikut tampil bernyanyi di atas panggung. Bahkan ia sempat ganti beberapa grup Orkes Melayu di tempat ia dibesarkan di Sidoarjo dan Surabaya, Jawa Timur. Via juga sempat menjadi vokalis grup band pop.

Tapi, berkat bimbingan ayahnya, via kembali ke jalur dangdut. Dangdut yang dipilihnya pun disesuaikan dengan keinginan Via sendiri. Via memilih dangdut bergenre pop koplo. Dalam bernyanyi dengan genre musik

pop koplo, Via mengaku memiliki misi agar anak muda mencintai musik dangdut.

Pembawaan lagu dangdut koplo ini ternyata mendapatkan tempat di hati penggemarnya. Via memiliki banyak fans yang menamakan dirinya sebagai Vyanisti, Vyanisti diresmikan secara langsung oleh Via Vallen pada 24 September 2010.

Berkat penggemarnya, secara perlahan perjalanan karier Via mulai sukses. Pada tahun 2015, di bawah naungan label Ascada Musik, Via Vallen memulai debut awal sebagai pedangdut solo dengan merilis single Selingkuh.

Lagu dengan genre koplo tersebut mengantarkan namanya mulai banyak dikenal orang. Bahkan, video klip resmi lagu Selingkuh yang diunggah di YouTube sudah ditonton lebih dari 10 juta kali.

Kemudian, Via Vallen mulai muncul di stasiun televisi. Ia diundang sebagai bintang tamu, dan ia menjadi salah satu penyanyi yang ikut dalam tour Inbox SCTV ke beberapa kota di Indonesia. Sejak itu nama Via Vallen mulai dikenal sebagai Ratu Pop Dangdut Koplo. Di tahun 2017 ini, ia juga dinobatkan sebagai penyanyi dangdut Paling Ngetop dalam ajang SCTV Music Awards 2017 (herbagi sumber)



SERING GUNAKAN SABUN ANTISEPTIK MEMBUAT KULIT IRITASI

DOKTER spesialis kulit dan kelamin dr. Rahadi Rihatmadja mengatakan sering menggunakan sabun antiseptik dapat membuat kulit iritasi dan kering.

“Memang baik tapi sebetulnya sabun yang tidak ada antiseptik punya daya untuk membunuh kuman juga,” ucapnya dalam webinar HUT RSCM ke 103 tahun yang diikuti secara daring di Jakarta.

Sabun antiseptik biasa digunakan oleh kalangan medis untuk membunuh kuman karena dinilai lebih ganas dan berpotensi tertular penyakit serius. Namun Rahadi mengatakan bagi masyarakat umum, cukup menggunakan sabun mandi biasa.

“Kalau pakai sabun antiseptik dari dokter kulit takutnya iritasi malah tangannya lama-lama jadi kering, kalo kering sawar kulit (pertahanan kulit) bisa ditembus oleh kuman dan jadi pecah-pecah,” ucap Rahadi.

Untuk mencegah kuman yang menginfeksi kulit, Rahadi juga menganjurkan untuk sering memotong kuku pendek agar kuman tidak berpindah ke bagian tubuh lain melalui kuku.

“Kalau kita menggaruk kelainan kulit yang ada kumannya atau ada jamur, itu pindah ke celah bawah kuku dan pakai garuk tempat lain bisa berpindah,” ucapnya.

Penting juga untuk tidak berbagi barang pribadi karena alat tersebut berpotensi terkontaminasi kuman dan jamur yang dapat menular.

Beberapa cara yang dapat menghilangkan jamur pada baju atau handuk adalah dengan merendam di air hangat suhu 60 derajat atau menggunakan sedikit karbol pada air rendaman untuk menghilangkan jamur.

Ia pun menjelaskan infeksi pada kulit tidak sama dengan alergi. Infeksi kulit bisa terjadi karena lapisan pelindung kulit yang menipis akibat dari perawatan yang salah atau kekurangan nutrisi.

Kulit yang kering dan kebiasaan menggaruk juga bisa menyebabkan penyakit biduran.

Lalu ada pula yang melalui saluran pernapasan seperti penyakit cacar, yaitu virus yang masuk lewat udara

lalu ke darah hingga ke jaringan kulit dan menyebar.

Rahadi pun menjelaskan cara membedakan gatal-gatal biasa dengan infeksi kulit adalah dengan melihat bentuk dan lokasi terdapat infeksinya.

“Yang gampang mana kala ada kelainan kulit yang ada nanahnya atau keluar cairan putih kekuningan kemudian mengering itu jadi kusta, kemungkinan besar itu infeksi. Kemudian letaknya di lipatan ketiak, lipat paha, dan anak-anak daerah bokong,” ucapnya.

Secara umum, infeksi pada kulit bisa dicirikan dari empat penyebabnya yaitu kuman bakteri, jamur, kutu badan atau parasit dan virus.

Penanganan pada infeksi kulit tidak selalu harus menggunakan antibiotik, karena tergantung dari penyebab infeksi itu sendiri.
(Ant)



Kalau pakai sabun antiseptik dari dokter kulit takutnya iritasi malah tangannya lama-lama jadi kering, kalo kering sawar kulit (pertahanan kulit) bisa ditembus oleh kuman dan jadi pecah-pecah,”

dr. Rahadi Rihatmadja
Dokter spesialis kulit dan kelamin



KAMERA IPHONE GUNAKAN SENSOR SONY

APPLE, perusahaan raksasa teknologi asal Amerika Serikat, mengakui memakai sensor gambar Sony pada kamera iPhone.

Dilansir dari The Verge, CEO Apple Tim Cook mengatakan hal tersebut melalui akun Twitter sembari melakukan tur di kantor pusat Sony di Jepang.

"Kami telah bermitra dengan Sony selama lebih dari satu dekade untuk menciptakan sensor kamera terdepan di dunia untuk iPhone," cuit Cook.

Cook juga berterima kasih kepada CEO Sony Kenichiro Yoshida karena telah mengajarkannya berkeliling fasilitas Kumamoto.

Pernyataan penggunaan sensor kamera Sony selama lebih dari satu dekade sangat penting karena Apple cenderung tertutup soal spesifikasi komponen perangkat keras yang masuk ke setiap iPhone.

Di situs resmi Apple pun, cenderung hanya mencantumkan spesifikasi setiap kamera iPhone - seperti resolusi, aperture, dan bidang

pandang daripada komponen spesifik yang digunakan. Namun, spesifikasi perangkat keras cenderung kurang penting di era fotografi komputasional.

Konon, banyak laporan dan rumor industri selama bertahun-tahun telah mengarah pada penggunaan perangkat keras Sony oleh Apple.

Sebuah laporan Wall Street Journal dari 2015 mengatakan bahwa Apple menggunakan dua sensor Sony di iPhone 6, dan teardown iFixit sebelumnya telah mereferensikan nomor model Sony tertentu.

Nikkei Asia mencatat Sony dianggap sebagai pemimpin dalam pasar sensor gambar, memimpin 44 persen pangsa pasar untuk sensor gambar CMOS pada tahun lalu. Sementara, Samsung adalah terbesar kedua dengan pangsa pasar 18,5 persen.

Pelacak gerak

Sebelumnya, Sony Group Corp merilis perangkat pelacak gerak yang

dapat dikenakan untuk membawa pengguna ke metaverse di ponsel pengguna.

Sistem bernama Mocopi ini terdiri dari enam bagian yang dikenakan di pergelangan tangan, pergelangan kaki, kepala, dan pinggul pengguna.

Penggunaan tersebut guna menganimasikan avatar di dalam berbagai aplikasi metaverse di ponsel Android Sony atau iPhone.

Dengan harga 49.500 yen (US\$360 atau Rp5,6 juta) dan diluncurkan di Jepang pada bulan Januari, kit Mocopi menambah usaha perusahaan ke dalam realitas virtual dan augmented.

Perusahaan yang berbasis di Tokyo ini telah membuat dorongan besar untuk memperluas kerajaannya di luar kekuatan game konsolnya dengan lebih banyak periferal untuk komputer pribadi dan game mobile.

Perusahaan ini juga memiliki headset PlayStation virtual reality (VR) dan penerusnya, keduanya dirancang untuk mengembangkan ekosistem pengalaman VR dalam

dunia metaverse.

Metaverse sendiri awalnya diinisiasi oleh pendiri Facebook Mark Zuckerberg yang kemudian mengganti nama perusahaan menjadi Meta Platforms Inc (Bisnis)





SMILING DEPRESSION: PURA-PURA CERIA SAAT DEPRESI

GEJALA Stephen tWitch Boss, seorang Disc jockey serta co-host di acara 'The Ellen DeGeneres Show' ditemukan tewas bunuh diri dengan luka tembak di kepala pada Selasa (13/12/2022).

Sang istri Allison Holker Boss mengungkapkan rasa cinta pada suaminya itu. "Dia meninggalkan warisan yang tidak bisa diremehkan dan dampak positifnya akan terus dirasakan. Boss telah menjadi inspirasi bagi keluarga hingga penggemar" ucap Allison.

Bunuh diri sebenarnya bukan penyakit mental. Potensi serius ini muncul akibat gangguan kesehatan mental mereka tidak terobati, jika depresi sering dikaitkan dengan kesedihan, kelesuan, dan keputusan. Namun, ada juga kondisi yang disebut smiling depression atau depresi tersenyum.

Melansir dari Healthline pada Jumat (16/12/2022), smiling depression adalah istilah untuk seseorang yang hidup dengan depresi di dalam namun tampak selalu tersenyum, aktif dan sangat bahagia, bahkan mungkin disebut normal atau sempurna oleh beberapa orang.

GEJALA SMILING DEPRESSION

Seseorang yang mengalami depresi tersenyum, dari luar tampak bahagia atau puas bagi orang lain. Namun di dalam, mereka akan mengalami gejala depresi yang sangat tidak nyaman.

Hal yang mendorong mereka terus berpura-pura bahagia, karena sang penderita merasa jika dia menunjukkan tanda-tanda depresi atau mengungkapkan perasaan yang sebenarnya, itu akan menjadi tanda kelemahan dan bisa membebani siapapun.

Risiko bunuh diri bagi penderita smiling depression cenderung lebih tinggi. Karena, orang dengan depresi berat terkadang merasa ingin bunuh diri tetapi mereka tidak memiliki energi untuk bertindak atas pemikiran ini. Sementara, seseorang dengan smiling depression lebih memiliki energi, sehingga dia bisa menindaklanjuti niatnya.

PENYEBAB SMILING DEPRESSION

1. Perubahan hidup yang besar

Seperti jenis depresi lainnya, smiling depression dapat dipicu oleh suatu situasi kegagalan, mulai dari pekerjaan ataupun suatu relasi hubungan.

2. Penghakiman

Secara budaya, orang mungkin menghadapi dan mengalami depresi secara berbeda, termasuk merasakan lebih banyak gejala somatik (fisik) daripada gejala emosional.

Para peneliti percaya bahwa perbedaan ini mungkin ada hubungannya dengan pemikiran yang berorientasi internal versus eksternal: jika pemikiran Anda berorientasi eksternal, Anda mungkin tidak fokus pada keadaan emosional batin Anda tetapi mungkin mengalami lebih banyak gejala fisik.

Di beberapa budaya atau keluarga, tingkat stigma yang lebih tinggi juga dapat berdampak. Misalnya, mengungkapkan emosi dapat dilihat sebagai "meminta perhatian" atau menunjukkan kelemahan atau kemalasan.

Seseorang yang merasa mereka akan dihakimi karena gejala depresi mereka akan lebih cenderung berpura-pura dan menyimpannya

untuk diri mereka sendiri.

3. Media sosial

Dikutip dari Medical News Today, di mana sebanyak 69 persen populasi AS menggunakan media sosial, tersedot atas realita yang dibangun di media sosial dan merasa gagal atas hidup sendiri.

4. Ekspektasi

Kita semua terkadang memiliki harapan yang tidak realistis terhadap diri sendiri untuk menjadi lebih baik atau lebih kuat. Seseorang juga dipengaruhi oleh ekspektasi luar, mulai dari rekan kerja, orang tua, saudara kandung, anak, atau teman.

Jika seseorang memiliki harapan yang tidak realistis untuk diri sendiri demi memikirkan harapan dari orang lain, kemungkinan seseorang akan menyembunyikan perasaan jika tampaknya tidak memenuhi harapan tersebut. Seseorang dengan perfeksionisme mungkin lebih berisiko, karena standar yang sangat tinggi yang mereka pegang.

DIAGNOSA SMILING DEPRESSION

Menurut WHO, smiling depression muncul dengan gejala antitesis (bertentangan) dengan gejala depresi biasa. Hal ini dapat mempersulit proses diagnosis. Kesulitan lain dalam mendiagnosis smiling depression adalah banyak orang bahkan mungkin tidak tahu bahwa mereka depresi atau tidak mencari bantuan.

Biasanya penderita harus sadar bahwa mereka membutuhkan profesional kesehatan mental, seperti psikiater, dan mulai memikirkan terkait gejala yang hampir dirasakan sepanjang hari dalam dua minggu.

Adapun, gejala-gejala ini dapat dilihat dari cara berpikir dan menangani aktivitas sehari-hari, seperti tidur, makan, dan bekerja.

PENGOBATAN SMILING DEPRESSION

Mengobati depresi jenis ini serupa dengan pengobatan tradisional lainnya untuk gangguan depresi mayor yang meliputi obat-obatan, psikoterapi, dan perubahan gaya hidup.

Langkah terpenting dalam menemukan pengobatan untuk smiling depression adalah membuka diri terhadap seseorang di sekitar. Ini bisa menjadi profesional, teman, atau anggota keluarga.

Berbicara dengan seorang profesional dapat sangat membantu untuk gejala depresi, karena seorang profesional dapat membantu Anda menemukan strategi yang dipersonalisasi untuk mengatasi dan taktik untuk proses berpikir negatif (bisnis)



Aroma Kecurangan(dari hal 1)

KOALISI Masyarakat Sipil yang terdiri dari sejumlah organisasi dan aktivis membuka posko pengaduan dugaan kecurangan usai muncul dugaan manipulasi dalam proses verifikasi faktual KPU. Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, memaparkan, terdapat dua temuan dari sejumlah aduan sejauh ini.

Pertama, dugaan itu bermula pada 7 November 2022, saat KPU provinsi menyampaikan hasil rekapitulasi verifikasi parpol kepada KPU Pusat. "Setelah melakukan verifikasi faktual parpol, KPU tingkat kabupaten/kota menyerahkan hasil verifikasi faktual ke KPU provinsi. Pada 6 November, KPU provinsi melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual parpol untuk seluruh kab/kota melalui aplikasi SIPOL. Nah, pada 7 November, waktu ini dijadwalkan untuk agenda penyampaian hasil rekapitulasi verifikasi parpol oleh KPU Provinsi kepada KPU Pusat," beber Kurnia dalam paparan virtual, Minggu (18/12/2022).

Praktik indikasi kecurangan diduga dilakukan oleh anggota KPU tingkat pusat yang mendesak agar KPU provinsi mengubah status verifikasi parpol dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS).

"Namun rencana itu terkendala, karena beberapa anggota KPU daerah, tidak sepakat untuk melakukan instruksi buruk tersebut," lanjutnya. Tak berhenti di situ. Pada temuan kedua, KPU pusat diduga mengubah strategi kecurangan dengan memberikan instruksi untuk mengubah status parpol kepada sekretaris KPU provinsi. KPU pusat diduga memerintahkan hal tersebut melalui video call.

"Caranya sekretaris provinsi memerintahkan pegawai operator Sipol, baik kabupaten/kota untuk mendatangi kantor KPU provinsi, kemudian diminta mengubah status verifikasi parpol," jelasnya.

Sekretaris yang dihubungi KPU pusat tersebut diduga mendapat ancaman mutasi apabila menolak perintah. Selain ancaman, para pegawai struktural di level daerah juga diiming-imingi jabatan oleh jajaran petinggi KPU pusat.

"Ternyata, dari informasi yang kita himpun, salah satu ancamannya memutasi pegawai atau ASN KPU daerah yang bertugas teknis tentang aplikasi Sipol tersebut," lanjutnya.

"Sementara untuk iming-imingi itu, mereka akan dipilih pada proses pemilihan calon anggota KPU provinsi/kabupaten/kota yang aka digelar pada 2023 mendatang," tandasnya.

Sementara itu, Anggota KPU Idham Holik menyebut pihaknya sudah menerima surat somasi yang dikirimkan oleh kuasa hukum yang mewakili anggota KPU beberapa daerah terkait dugaan manipulasi data verifikasi faktual oleh KPUD.

Ia menyebut surat tersebut sulit diproses karena tidak disebutkan lokasi terjadinya dugaan manipulasi oleh petugas KPU di daerah. Namun, ujarnya, KPU akan tetap merespons

somasi tersebut meski ia tidak menjelaskan bentuk responsnya seperti apa. "Kami tetap apa yang kami terima dalam bentuk surat somasi tersebut, informasi dari divisi hukum dan pengawasan tetap akan ditindaklanjuti," ungkapnya.

Di sisi lain, Sekjen KPU RI Bernad Darmawan Sutrisno disebut-sebut terlibat melakukan dugaan kecurangan dalam proses verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2024. Bernad membantah hal itu. "Dapat dijelaskan, sekretariat di setiap tingkatan KPU memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagai supporting system. Sekretariat memberikan dukungan teknis administrasi kepada ketua dan anggota KPU, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota," kata Bernad mengawali tanggapannya, Minggu (18/12/2022).

Bernad mengatakan kewenangan sekretariat sebatas pada fasilitasi tahapan pemilu. Sementara di tataran kebijakan dan keputusan, Bernad mengatakan hal itu menjadi wewenang para ketua dan anggota KPU baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"Kaitannya dengan penyelenggaraan tahapan pemilu, kewenangan sekretariat sebatas memfasilitasi terlaksananya setiap tahapan pemilu. Kebijakan dan keputusan di setiap tahapan merupakan wewenang ketua dan anggota KPU, baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota," ujarnya.

Bernad lalu menyinggung soal agenda 7 November yang dijadwalkan untuk agenda penyampaian hasil rekapitulasi verifikasi faktual parpol oleh KPU Provinsi kepada KPU Pusat. Menurutnya, pada hari yang sama dilakukan rapat rutin di tingkat sekretariat KPU Provinsi.

"Bahwa tanggal 7 November 2022, dilakukan rapat di tingkat sekretariat KPU Provinsi merupakan kegiatan rutin dalam rangka penyiapan rekap di provinsi," katanya.

Oleh karena itu, Bernad membantah soal dirinya diduga melakukan intimidasi terkait proses verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu.

"Adapun tuduhan bahwa saya melakukan intimidasi dan ancaman melalui video call pada tanggal 7 November 2022, itu tidak benar. Karena setiap kegiatan sudah ada tim teknis yang memiliki tugas untuk menjelaskan substansi," katanya.

Advokat Themis Indonesia Law Firm, Ibnu Syamsu Hidayat, mengatakan pihaknya telah menyampaikan somasi terhadap KPU RI terkait dugaan kecurangan, manipulasi, dan pelanggaran hukum dalam verifikasi faktual parpol. Ibnu mengatakan dugaan kecurangan itu yakni dengan mengubah status verifikasi parpol yang mulanya tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi memenuhi syarat (MS).

"Ada beberapa daerah ada perubahan yang mulanya tertera parpol tertentu TMS kemudian itu menjadi MS tanpa melalui proses pengaduan yang sah, baik yang dilakukan sebelum perbaikan ataupun setelah perbaikan. Memang

parpol-parpol ini adalah partai yang sebetulnya tidak memenuhi syarat akan tetapi dijadikan memenuhi syarat," kata Ibnu dalam kesempatan yang sama.

"Pelanggaran dari TMS menjadi MS dari sejumlah partai tersebut kami menduga dilakukan oleh anggota KPU RI atau pejabat KPU RI kemudian anggota KPU Provinsi atau kabupaten/kota atau pejabat KPU Provinsi atau kabupaten/kota," lanjut dia.

Godok Kampanye di Luar Jadwal

Di sisi lain, Bawaslu dan KPU sedang merumuskan aturan soal kampanye di luar jadwal. Aturan itu ditargetkan selesai pada Januari 2023. "Aturannya belum ada (supaya tidak kampanye di luar jadwal), kita lagi ngobrol sama Pak Afif (Komisioner KPU), targetnya Desember-Januari selesai," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.

Tujuan aturan itu dibuat untuk menciptakan suasana kondusif. Karena jadwal masa kampanye dimulai pada akhir tahun depan. "Kampanye kan dimulai 28 November, belum sekarang. Masih dirumuskan kampanye di luar jadwal itu apa," ujarnya.

"Ini daerah yang akan kita rumuskan bareng karena dari Desember sampai 28 November (bukan masa kampanye), ini harus kita atur ke depan. Supaya pemilu kita kondusif, tidak ada kemudian, tidak ada yang mendapat privileg yang begitu besar, kan prinsip pemilu adalah non diskriminasi," sambungnya.

Sebelumnya, Bawaslu RI memutuskan untuk tidak melanjutkan laporan dugaan Anies Baswedan melakukan kampanye saat mengunjungi Aceh beberapa waktu lalu. Meski begitu, Bawaslu menilai kegiatan Anies terkesan tak etis, karena akan dianggap safari politik sejak dini.

"Walaupun laporan pelapor tidak memenuhi syarat materiil, namun ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan AB (Anies Baswedan) dapat dipandang sebagai

RINCIAN JUMLAH KONTESTAN PEMILU SELAMA PERIODE 1955-2024:

1955:	118 parpol/kontestan
1971:	10 parpol/kontestan
1977:	3 parpol/kontestan
1982:	3 parpol/kontestan
1987:	3 parpol/kontestan
1992:	3 parpol/kontestan
1997:	3 parpol/kontestan
1999:	44 parpol/kontestan
2004:	24 parpol/kontestan
2009:	44 parpol/kontestan
2014:	15 parpol/kontestan
2019:	20 parpol/kontestan
(16 partai tingkat nasional dan 4 partai lokal di Aceh)	
2024:	23 parpol/kontestan
(17 partai tingkat nasional dan 6 partai lokal di Aceh)	

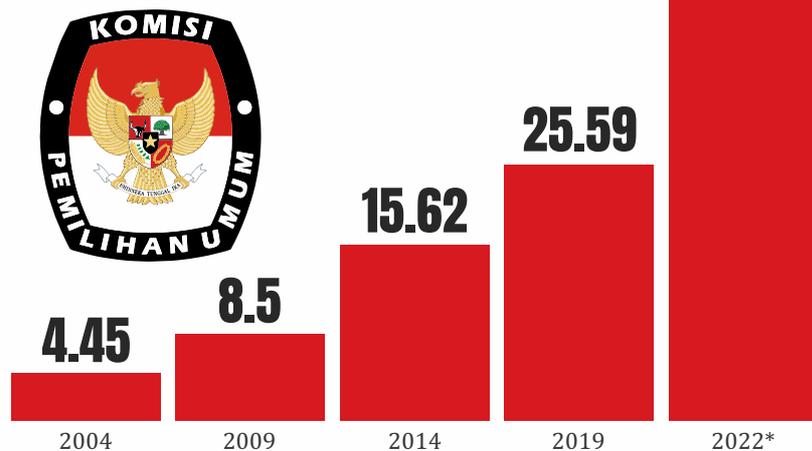


tindakan yang kurang etis, sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung, dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon Presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang," kata Anggota Bawaslu RI Puadi di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (15/12).

Apalagi menurut Puadi, publik telah mengetahui kalau Anies merupakan capres yang diusung oleh partai NasDem. Menurutnya, wajar saja jika aktivitas yang dilakukan oleh Anies akan dipandang sebagai aktivitas kampanye.

"Publik telah mengetahui bahwa Anies Baswedan merupakan bakal calon presiden yang akan diusung oleh gabungan partai tertentu, sehingga aktivitas safari politiknya dapat saja dimaknai sebagai aktivitas mengkampanyekan atau setidaknya mensosialisasikan dirinya sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024, terutama dalam rangka meningkatkan elaktabilitasnya nanti di Pemilu 2024," kata Puadi. (wid, ant,rls/dya)

PERBANDINGAN ANGGARAN PEMILU 2004-2024* (DALAM RP TRILIUN)



Sepekan Kebijakan 'No' Covid Dilonggarkan RS hingga Krematorium di China Keteteran



Pekerja dengan pakaian pelindung memindahkan jenazah dalam peti mati di rumah duka, di tengah wabah penyakit virus corona di Beijing China. (Foto-Reuters)

BEIJING - Pemerintah China baru-baru ini memutuskan untuk melonggarkan penguncian (lockdown) dan membuka aktivitas perekonomian di beberapa kota besar, termasuk Beijing. Sepekan usai kebijakan 'no' Covid tidak seketat sebelumnya, ledakan kasus baru dan kematian terjadi.

Mengutip data worldometer.info, hingga Minggu (18/12/2022) pagi, jumlah kasus di China mencapai 376.361 kasus dengan penambahan 2.286 kasus baru per Sabtu (17/12/2022). Jumlah kematian selama ini tercatat sebanyak 5.235 jiwa. Seperti diketahui, protokol besutan Presiden Xi Jinping tersebut dilonggarkan setelah gelombang protes di penjuru Negeri Tiongkok.

Rumah duka dan krematorium di penjuru Beijing tampak berjuang untuk melayani permintaan yang melonjak. Padahal banyak pekerja mereka juga terdeteksi positif Covid-19 dan tidak bekerja karena sakit. Institut riset berbasis di Amerika Serikat, pekan ini bisa menjadi momen meledaknya kasus Covid-19 di China dan meramalkan jumlah korban jiwa Covid-19 melampaui 1 juta orang pada 2023.

Reuters melaporkan sekitar 30 peti mati di jalan masuk rumah pemakaman Dongjiao, krematorium khusus Covid di Beijing. Di antara mereka, terparkir ambulans dan kereta dengan jenazah yang dibalut kain di bagasi terbuka. Jenazah tersebut kemudian diambil oleh pekerja yang menggunakan baju hazmat untuk dipindahkan ke ruang persiapan kremsi. Tiga cerobong asap di rumah pemakaman tersebut terus-terusan mengebul.

Beberapa meter dari krematorium, di rumah pemakaman, ada sedikitnya 20 kantong jenazah diletakkan di lantai. Reuters tidak bisa memastikan penyebab kematian jenazah tersebut. Petugas keamanan di tempat parkir dan pemilik toko tempat abu kremasi di rumah pemakaman tersebut, mengatakan kepada Reuters bahwa angka kematian di atas rata-rata dibandingkan dengan periode sebelum 7 Desember. Pekerja yang sakit juga berpengaruh terhadap aktivitas di lusinan rumah

pemakaman di Beijing.

"Kami punya mobil dan pekerja yang lebih sedikit. Banyak yang dites positif," kata pekerja di Rumah Pemakaman Miyun kepada Reuters. Dia menambahkan bahwa permintaan kremasi mengantre.

Tidak bisa dipastikan bahwa antrian permintaan kremsi terkait kenaikan kasus Covid. Di rumah pemakaman Huairou, satu jenazah harus menunggu 3 hari sebelum bisa dikremasi. "Anda bisa membawa jenazahnya sendiri ke sini, karena kondisinya sangat sibuk," kata staf di sana.

Rilis Panduan Aktivitas Ekonomi

China segera menerbitkan panduan protokol kesehatan antipandemi Covid-19 edisi ke-10 yang berorientasi pada perkembangan ekonomi. Panduan edisi terbaru itu akan kondusif bagi China. "Negara dengan populasi terbesar di dunia, untuk membuka diri secara bertahap sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan lancar," kata pakar infeksi pernapasan menular Prof Zhong Nanshan.

Mengutip data yang dimilikinya, dia menjelaskan bahwa orang yang pernah terjangkit Covid-19 varian Omicron memiliki risiko sangat kecil tertular lagi dalam jangka waktu satu tahun. Setelah terinfeksi Omicron, pasien akan memproduksi antibodi yang kekuatannya hampir sama dengan satu dosis vaksin. Demikian disampaikan Zhong seperti dikutip media setempat.

Sebelumnya dia mengatakan bahwa dampak Omicron tidak parah karena 99 dari 100 orang yang terinfeksi dapat sembuh dalam waktu 10 hari. Saat ini Omicron telah menyebar luas di China, termasuk ibu kota Beijing. "Tetapi patogenitasnya akan cepat berkurang," kata penemu wabah SARS yang mewabah di China pada 2013 itu.

Zhong memaparkan bahwa pada awal pandemi, Covid-19 menyerang saluran pernapasan atas dan paru-paru. Tetapi setelah dua tahun bermutasi, virus penyebabnya hanya terkonsentrasi pada saluran pernapasan atas saja.

Tingkat fatalitas Omicron hanya sekitar 0,1 persen atau sama dengan flu biasa, katanya. Dia membandingkannya dengan flu burung H1N1 yang menulari 120 ribu warga China pada 2009 yang memiliki fatalitas sebesar 0,6 persen.

Zhong juga mendorong agar vaksinasi penguat digencarkan, terutama menjelang musim mudik massal untuk merayakan Tahun Baru

Imlek.

Terkait dengan isu bahwa penularan Omicron di wilayah utara China, seperti Beijing, lebih kuat dibandingkan di selatan seperti Guangzhou, Zhong mengatakan tidak ada perbedaan yang signifikan pada varian virus yang terdeteksi di selatan dengan di utara.

Ia mengungkapkan bahwa di Guangzhou dan Chongqing di wilayah barat daya, wabah didominasi Omicron subvarian BA.5.2. Sementara di Beijing dan Baoding di Provinsi Hebei didominasi subvarian BF.7 yang merupakan hasil mutasi BA.5.2.

China sebelumnya menerapkan

kebijakan nol kasus Covid-19 secara ketat. Sepanjang 2022 negara itu telah beberapa kali menutup akses ke kota-kota besar dan pusat perekonomian, seperti Shanghai, Guangzhou, Xian, dan Beijing. Kebijakan itu telah menyebabkan pelambatan pertumbuhan perekonomian dan gejolak sosial.

Otoritas China melalui Dewan Pemerintahan telah mengeluarkan 10 kebijakan baru yang melonggarkan protokol kesehatan antipandemi sejak 7 Desember 2022, di antaranya dengan mencabut aturan wajib tes PCR dan pemindaian kode kesehatan. (reuters, wid, ist/dya)

PERKEMBANGAN KASUS MENINGGAL AKIBAT COVID-19 DI CHINA

LOKASI	TOTAL KASUS	KASUS PER 1 JT ORANG	MENINGGAL
CHINA	1.891.352	1.349	5.235
Hubei	68.862	1.177	4.512
Shanghai	64.978	2.469	595
Guangdong	55.674	Tidak ada data	8
Jilin	40.481	Tidak ada data	5
Beijing	25.249	1.172	13
Sichuan	11.315	140	5
Hainan	10.287	1.111	6
Henan	8.692	Tidak ada data	23
Chongqing	8.542	275	7
Mongolia Dalam	8.237	Tidak ada data	1
Fujian	7.326	190	1
Zhejiang	5.858	102	1
Shaanxi	5.462	Tidak ada data	3
Heilongjiang	5.389	Tidak ada data	13
Yunnan	5.007	Tidak ada data	2
Shanxi	5.006	137	0
Shandong	4.564	Tidak ada data	8
Jiangsu	3.796	47	0
Liaoning	3.023	Tidak ada data	2
Hebei	2.839	38	7
Xinjiang	2.632	Tidak ada data	3
Tianjin	2.627	168	3
Hunan	2.442	36	4
Guangxi	2.431	50	2
Guizhou	1.756	Tidak ada data	2
Anhui	1.699	27	6
Gansu	1.561	59	2
Jiangxi	1.547	34	1
Tibet	1.522	434	0
Qinghai	510	Tidak ada data	0
Ningxia	238	Tidak ada data	0